

BAB 1:PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

WHO menetapkan status *Global Emergency* pada kasus virus Corona ini pada akhir Januari 2020 dan pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai Covid-19. Hingga 28 Maret 2020, jumlah kasus infeksi Covid-19 terkonfirmasi mencapai 571.678 kasus. Awalnya kasus terbanyak terdapat di Cina, namun saat ini kasus terbanyak terdapat di Italia dengan 86.498 kasus, diikuti oleh Amerika dengan 85.228 kasus dan Cina 82.230 kasus. Virus ini telah menyebar hingga ke 199 negara. Kematian akibat virus ini telah mencapai 26.494 kasus. Tingkat kematian akibat penyakit ini mencapai 4-5% dengan kematian terbanyak terjadi pada kelompok usia di atas 65 tahun.⁽¹⁾

Pada bulan April 2020 kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia paling banyak rentang usia 30-59 tahun sebanyak 351 orang dan terbanyak kedua pada rentang usia 60-79 tahun yaitu 302 orang. Kasus kematian akibat Covid-19 terus meningkat hingga tanggal 8 Februari 2021 sebanyak 31.763 orang dengan 47,3% merupakan berasal dari kelompok umur lebih dari 60 tahun dan 32,7% kelompok umur 46 sampai dengan 59 tahun. ⁽²⁾ Pada tanggal 8 Mei 2021 kasus Covid-19 bertambah menjadi 1,7 juta kasus dengan 1,56 juta kasus yang sembuh dan 46.842 kasus yang meninggal dunia.⁽³⁾ Kasus kematian akibat Covid-19 disertai dengan penyakit penyerta yaitu paling banyak penyakit hipertensi, diabetes, jantung, dan penyakit pernapasan seperti asma dan juga penyakit paru obstruktif yang sudah menahun.⁽⁴⁾

Peneliti WHO menyatakan bahwa pengidap penyakit kardiovaskular (PKV), diabetes, hipertensi dan obesitas lebih berisiko rentan terpapar Covid-19 dan memiliki kasus kematian lebih tinggi terhadap infeksi Covid-19. Lansia yang memiliki riwayat penyakit kronis sangat berisiko terinfeksi Covid-19. Tantangan yang dihadapi oleh sistem kesehatan di seluruh dunia adalah meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan oleh orang-orang dengan Covid-19, dan semakin diperburuk dengan adanya rasa takut, stigma, misinformasi, dan pembatasan gerak yang dapat mengganggu pemberian layanan kesehatan untuk semua penyakit. Pada saat kapasitas sistem kesehatan berlebih dan masyarakat tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang diperlukan, maka akan angka kematian langsung akibat wabah dan kematian tidak langsung dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dan diobati dapat meningkat secara drastis. Penguatan pelayanan kesehatan primer dalam rangka realisasi cakupan kesehatan merupakan pondasi penting untuk beradaptasi dalam keadaan pandemi saat sekarang ini. Upaya Kesehatan Masyarakat esensial maupun Upaya Kesehatan Primer yang dimaksud meliputi: imunisasi, kesehatan ibu dan bayi baru lahir, pengobatan pasien TB, HIV, Penyakit kronis seperti Diabetes, Hipertensi, dan sebagainya, merupakan upaya kesehatan yang termasuk layanan prioritas pada saat pandemi Covid-19. ⁽⁵⁾

Presiden mengeluarkan kebijakan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa. Kemudian Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disesase 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

dimana pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid 19. Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020, dan apabila tidak mencukupi pemerintah daerah dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia yang diprioritaskan untuk : penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial.⁽⁶⁾

Penanganan Pengendalian penularan Covid-19 di daerah pemerintah mewajibkan daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan (refocusing) dan realokasi anggaran melalui penggunaan Belanja Tidak Terduga. Data Kemendagri per 16 April 2020 dimana terdapat 528 daerah yang telah melaksanakan refocusing anggaran. Sehingga jumlah besaran Dana Tidak Terduga (BTT) APBD Induk di seluruh Indonesia bertambah dari Rp. 2,94 triliun menjadi Rp. 24,74 triliun setelah refocusing anggaran APBD daerah. Peningkatan tersebut sangat signifikan yaitu sebesar 842,93%. Dalam Penanganan Kesehatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang tertinggi se-Indonesia mengalokasikan anggaran dana BTT dengan alokasi sebesar Rp. 2,88 triliun. Dan Pemerintah Daerah Kota Denpasar merupakan daerah yang paling rendah dalam mengalokasikan dana BTT yaitu sebesar 3 Milyar Rupiah.⁽⁷⁾

Muhammad Junaidi (2020) menyatakan bahwa refocusing anggaran dapat menimbulkan dampak yang diantaranya yaitu penganggaran sebelumnya tentunya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian terdapat konsekuensi dimana terbengkalainya penganggaran sebelumnya yang pastinya terabaikan dengan adanya

penganggaran yang baru. Dampak yang jelas-jelas terbukti adalah dengan adanya terbengkalainya kebijakan yang dijalankan sebelumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁽⁸⁾ Penelitian Natta Sanjaya (2020) mengungkapkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menjalankan pengelolaan anggaran sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah pusat melalui mekanisme refocusing dan realokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara tepat. Namun peneliti menemukan permasalahan yaitu konsistensi skala prioritas penganggaran yang terjadi pada masing-masing OPD masih belum tepat dan efektif.⁽⁹⁾

Pemerintah Kota Payakumbuh mengeluarkan kebijakan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 900.39/248/WK-PYK/2020 tentang Penetapan penanggulangan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat bencana non alam penanganan penanggulangan Covid 19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh TA 2020. Besaran dana yang telah digunakan untuk tanggap darurat Covid-19 sebesar Rp. 450.000.000,- dan besaran belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid 19 sebesar Rp. 37.400.764.036,- yang berasal dari penyesuaian yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kota Payakumbuh. Yang mana Untuk kebutuhan penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh mendapatkan anggaran sebesar Rp. 15.238.467.936,-⁽¹⁰⁾

Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh merupakan salah satu OPD yang melaksanakan refocusing dan realokasi anggaran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ka. Sub Program, Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh bahwa dalam pelaksanaan refocusing dan realokasi anggaran berdampak

terhadap pelaksanaan anggaran program kegiatan dimana penganggaran kegiatan sebelumnya tidak efektif lagi, karena belanja barang/jasa untuk program dan kegiatan sudah di rasionalisasi sekurang-kurangnya 50% dari anggaran sebelumnya. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh melakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 729.013.657,- dari total anggaran Rp. 102.090.853.693,- yaitu sebanyak 0,74% dari total anggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Program dan kegiatan yang dilakukan penyesuaian anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Anggaran Sebelum dan Sesudah Refocusing dan Realokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2020

No	Program	Pagu APBD (Rp)	Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	19.290.480	13.225.000	6.065.300
2	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	11.508.630	8.592.000	2.916.630
3	Peningkatan mutu Puskesmas dan jaringannya	21.615.520	15.267.510	6.348.010
4	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	22.148.860	13.225.000	8.923.860
5	Peningkatan Pengawasan Pangan dan bahan Berbahaya	59.920.853	28.689.000	31.231.853
6	Peningkatan Lingkungan Sehat	107.911.665	66.533.965	41.337.00
7	Penyusunan Dokumen Enviromental Health Risk Assessment (EHRA)	102.639.850	102.639.850	0

No	Program	Pagu APBD (Rp)	Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
8	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	79.437.375	24.172.500	55.264.875
9	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	19.228.490	16.616.840	2.611.650
10	Peningkatan perencanaan Pelayanan Kesehatan (Belanja jasa perencanaan gedung kantor)	104.148.725	92.735.940,00	11.412.785
11	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu	87.048.452	87.048.452	0
12	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	253.716.000	53.716.000	200.000.000
13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	219.600.000	219.600.000	0
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	32.855.000	20.000.000	12.855.000
TOTAL		19.629.746.760	729.013.657	18.900.733.103

Sumber: Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2020

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pemegang program pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular kegiatan yang dilakukan penyesuaian anggaran adalah sosialisasi penanggulangan penyakit menular yang mengundang masyarakat sehingga kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan, bukan hanya karena anggarannya tidak ada tetapi juga disebabkan keadaan pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Refocusing Anggaran Dan Realokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2020”.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah setelah refocusing dan realokasi anggaran mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dianggarkan sebelumnya?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2020.

1.3.2 Tujuan Khusus

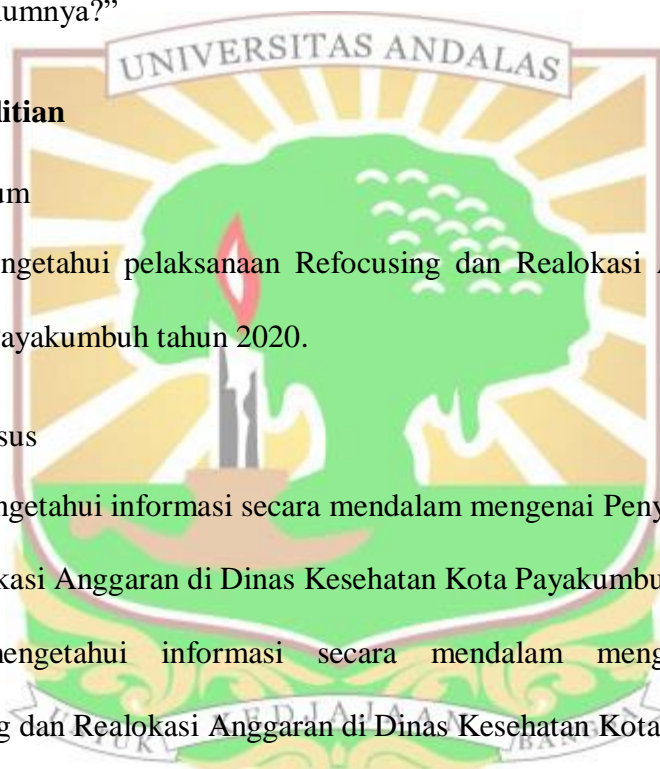
1. Untuk mengetahui informasi secara mendalam mengenai Penyusunan Refocusing dan Realokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
2. Untuk mengetahui informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
3. Untuk mengetahui informasi secara mendalam mengenai pelaporan Refocusing dan Realokasi Anggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Kesehatan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan refocusing dan realokasi anggaran

2. Bagi Akademik



Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya mengenai Analisis Refocusing dan realokasi Anggaran

3. Bagi Peneliti

Dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pengalaman peneliti dengan melakukan penelitian mengenai Analisis Refocusing dan realokasi Anggaran

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sistem. Ruang lingkupnya terdiri dari proses perencanaan dan penyusunan refocusing dan realokasi anggaran.

